

Andy Arya Maulana Wijaya,

bulawambona.87@gmail.com

Dosen Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Buton

**MODAL SOSIAL UNTUK KAPASITAS
COMMUNITY GOVERNANCE (STUDI
KASUS PEREMPUAN PESISIR
KELURAHAN SULAA KOTA BAUBAU)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandangan yang lain tentang peran perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. Bahwa peran perempuan pesisir tidak saja terbatas pada peran domestiknya saja, namun dengan pengelolaan modal sosial perempuan pesisir juga dapat berkontribusi dalam governance di tingkat lokal.

Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini, yakni modal sosial perempuan pesisir yang nampak pada kelompok-kelompok perempuan pesisir dapat mengelola keberlanjutan organisasi perempuan pesisir pada tataran modal sosial bonding, bridging dan linking. Dalam hal modal sosial bonding ditunjukkan dengan Kepemimpinan organisasi kelompok perempuan yang cukup efektif dalam mengelola organisasi, adanya kesadaran gerakan menabung, dan berlangsungnya proses berbagi informasi dan pengetahuan; untuk modal sosial bridging Ditunjukkan dalam bentuk jaringan kerjasama dengan kelompok lain, dengan jaringan ini kemudian kelompok perempuan pesisir memproduksi berbagai inovasi usaha dan berbagai pengetahuan umum lainnya; serta modal sosial linking Ditunjukkan pada adanya partisipasi kelompok perempuan pesisir baik dalam pengembangan kelompok, pelatihan, pemasaran produk usaha mereka, serta pemerolehan bantuan dari Pemda. Namun, perubahan lingkungan, kemampuan sumberdaya serta tuntutan yang terus berubah memerlukan adanya adaptasi terus menerus terhadap kapasitas kelompok perempuan pesisir, oleh karena itu dalam persoalan dukungan pemerintah daerah Kota Baubau tetap diperlukan.

Keywords: *community governance, modal sosial, perempuan pesisir, Universitas Muhammadiyah Buton*

1. PENDAHULUAN

Dalam komunitas masyarakat lokal apapun itu senantiasa memiliki nilai-nilai bersama yang mengatur interaksinya. Begitu juga dengan komunitas/ kelompok masyarakat pesisir di Kota Baubau, melalui kepemilikan nilai-nilai tersebut biasanya menjadi identitas sosial masyarakat tersebut. Didalamnya mengandung

serangkaian nilai yang mencakup hubungan sosial, etika sosial hingga bangunan jaringan sosial masyarakat.

Pada konteks lain, komunitas perempuan menjadi entitas yang sangat erat dengan keberadaan nilai lokal tersebut. Kasus di komunitas masyarakat lokal Kota Baubau yang erat dengan budaya buton, perempuan juga memiliki peran-peran tertentu dalam tatanan sosial tidak terkecuali adalahikut

membantu pemenuhan ekonomi keluarganya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan adalah kelompok masyarakat yang rentan secara sosial maupun ekonomi. Misalnya saja ketika budaya patriarki dalam rumah dan kepemilikan keterampilan (*skills*) yang seringkali terbatas, hal ini kemudian menambah persoalan bahwa kawasan pesisir adalah sumber kantong-kantong kemiskinan (Salman, 2010).

Kasus di atas memang cukup kasuistik, dalam artian bahwa di lingkungan dan budaya masyarakat yang berbeda maka akan ditemukan persoalan yang berbeda juga. Karena itu, kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam komunitas masyarakat pesisir memiliki nilai lokal tertentu, yang mana melalui nilai-nilai lokal tersebut mampu dikelola menjadi rangkaian aktivitas maupun interaksi masyarakat pesisir dalam memecahkan masalah-masalah publik di lingkungannya. Kemampuan tersebut biasa dikatakan sebagai bentuk kearifan lokal, yang secara langsung maupun tidak langsung telah terinternalisasi dalam hubungan sosial masyarakat lokal. Hal ini mampu dilihat pada ranah kepemimpinan lokal, dengan begitu masyarakat lokal memiliki kemampuan sendiri dalam menangani beberapa masalah publik misalnya konflik warga, cekcok keluarga, konflik tanah, pengorganisasian masyarakat untuk mengakses modal, perkemahan pemuda hingga pada

upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Betapapun demikian memang terdapat beberapa keterbatasan yang inheren didalam komunitas masyarakat, seperti misalnya pengetahuan dan informasi sehingga nilai-nilai sosial kearifan lokal tersebut belum menjadi aspek keberdayaan masyarakat jika tidak dikelola secara maksimal. Persoalan seperti ini menjadi salah satu persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Dalam kerangka otonomi daerah saat ini bisa menjadi salah satu upaya membuka jalan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis pada nilai-nilai masyarakat lokal.

Kajian dalam tulisan ini bermaksud mengkaji nilai-nilai sosial masyarakat lokal tersebut, khususnya pada kelompok perempuan pesisir. Dimana konsep tersebut dikerangkakan sebagai bentuk modal sosial (*social capital*) yang kini menjadi kajian menarik dalam usaha menciptakan *good governance*.

Karena itu, penelitian ini mencoba menjelaskan modal sosial perempuan pesisir sebagai sebuah kapasitas komunitas (*community*) dalam *governance*, dengan mengambil *setting* di kelompok perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa Kota Baubau. Kajian ini berusaha menghadirkan komunitas masyarakat pesisir untuk memahami keterkaitan nilai lokal dan *governance* dalam kontestasi kebijakan publik serta pe-

nyelenggaraan pemerintahan yang demokratis ditingkat lokal. Setidaknya kajian ini akan memberi pandangan yang berbeda tentang interksi sosial masyarakat lokal khususnya perempuan pesisir dalam wacana *governance* di tingkat lokal saat ini.

1.1. Paradigma *Governance*

Konsep "*governance*" merupakan perluasan dari konsep "*government*". Konsep *government* (pemerintah) sebagai lembaga yang selama ini memonopoli penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas yang dihadapi oleh Negara dalam kegiatan penyelenggaraan urusan *public*. Di mana, konsep *governance* menunjuk pada pelibatan lembaga lain non-negara (pasar dan masyarakat) dalam penyelenggaraan urusan publik dengan memberikan peran dan ruang yang lebih luas pada lembaga non-pemerintah, kegiatan pemerintahan menjadi lebih partisipatif, responsif dan akuntabel pada kepentingan publik (Dwiyanto, 2003).

Perubahan paradigma tersebut kemudian mengubah cara pandang dan aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Inti dari pemahaman *governance* kemudian oleh para ahli didefinisikan pada adanya kerjasama melalui *network* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan publik antara pemerintah (*state*), swasta (*market*) dan Masyarakat (*civil society*) secara seimbang untuk mencapai tujuan bersama, se-

hingga menciptakan proses pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif (UNDP, 1997; Hambleton, 2004:50; Rohman et.al, 2012; Osborne dan Gaebler, 1992; Stocker 1998 dalam Sudarmo, 2011)

Basis untuk memahami *governance* tersebut adalah oleh adanya keterlibatan *multi stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disini kemudian, peran-peran *state, non state* bahkan *supra state* diperlukan secara seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam perumusan kebijakan publik (*decision making*). Perkembangan ini mulai diterapkan pada proses formulasi kebijakan yang tidak lagi hanya dimainkan dan didominasi oleh Negara atau pemerintah yang berkuasa saja Denhardt and Denhardt (2003; dalam Sudarmo 2011: 73). Denhardt dan Denhardt juga memperkenalkan pergeseran paradigma ini pada isu terkait administrasi publik kontemporer, yakni *network, social capital, pertanggungjawaban birokrasi, local governance, globalisasi dan kolaborasi* (dalam Sudarmo, 2011: 73). Jelas bahwa *governance* dapat berjalan efektif jika ditunjang pula oleh kemampuan aktor diluar *state* (pemerintah), masyarakat adalah salah satunya yang dituntut untuk memiliki kapasitas itu.

1.2. Pengertian dan Peran Modal Sosial

Sejalan dengan bahasan *governance*, konteks komunitas masyarakat tentu memiliki modal sosial yang menjadi dasar interaksi dan aktivitas sosialnya. Dimana hal ini, menyangkut nilai-nilai kepercayaan (*trust*), kerjasama (*network*) dan norma (*norms*) yang menjadi dasar relasi antara masyarakat secara informal serta berkembang didalam komunitas masyarakat seiring dengan interaksi sosial yang dilakukannya (Putnam, 1996; Fukuyama, 2010; Bowles dan Gintis, 2002; Sudarmo, 2011: 197-198; Hasbullah, 2006:9; Suharto, 2011:98-100).

Sementara itu, Wim van Oorschot dan Ellen Finsveen (2010) yang mengkaji mengenai *social capital* dan keterkaitannya dengan negara kesejahteraan mengkaitkan *social capital* terdiri dari 3 aspek yaitu : (1) Jaringan Sosial; Hubungan dalam dan antara keluarga dan teman-teman (sosialisasi informal), keterlibatan dalam masyarakat dan kehidupan organisasi (misalnya sukarela), dan keterlibatan publik (misalnya pemilihan); (2) norma-norma sosial; nilai-nilai dalam masyarakat, norma dan kebiasaan kerjasama; dan (3) kepercayaan sosial; Kepercayaan pada lembaga sosial dan orang lain.

Karenanya, modal sosial disini dapat dinilai sebagai sebuah proses produktif dari masyarakat. karena itu, menjadi penting untuk memandang hal tersebut kedalam rangkaian interaksi dan aktivitas masyarakat, yang dalam penelitian ini melihat

keterkaitan modal sosial dengan *governance* oleh komunitas masyarakat pesisir. Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian menjalin kerja-sama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama (Suharto, 2007: 98).

Terdapat sejumlah studi administrasi publik yang menunjukkan bahwa anggota masyarakat mengurangi rasa kegelisahan, keunikan, dan kreativitasnya dalam usaha menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap norma-norma, sikap dan nilai-nilai dominan dalam kehidupan organisasi (Mindarti, 2007: 133).

Oleh karena itu, arena produksi modal sosial dalam *governance* pada penelitian ini akan dianalisis melalui konteks jaringan (*network*) dalam bentuk organisasi masyarakat lokal, yaitu : a) *Bonding Social Capital*, yaitu merupakan hubungan antar anggota dalam sebuah kelompok komunitas sejenis, yang mencakup hubungan atau ikatan kuat dalam kelompok-kelompok b) *Bridging social capital*, merupakan hubungan antar sesama *bonding*, tetapi berbeda kelompok atau berbeda jaringan sosial. dan c) *Linking social capital*, hubungan antar sebuah kelompok komunitas atau kelompok-kelom-

pok komunitas yang berbeda dengan pemerintah setempat.

1.3. Kapasitas *Community* dalam *Governance*

Dalam studi Administrasi Publik saat ini, diperkenalkan mengenai peranan komunitas atau kelompok masyarakat dalam memecahkan persoalan mereka yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Pertanyaan penting disini adalah seperti apa kapasitas yang dimiliki komunitas untuk mendukung aktivitasnya dalam *governance*, beberapa pihak mengkaitkan proses ini dengan kepemilikan modal sosial (*social capital*) yang kuat dimasyarakat.

Tentunya modal sosial akan semakin kuat jika ia senantiasa digunakan di masyarakat. Seperti misalnya melalui ikatan-ikatan modal sosial kemudian menjadi sarana masyarakat berkerjasama dengan berbagai pihak atau dengan pemerintah. Dengan begitu, komunitas lokal mampu mengarahkan perubahan dengan inovasi, dan penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif ketika pemerintah dan komunitas masyarakat bekerjasama (Eversole, 2011: 66).

Boleh dikatakan bahwa sarana pemanfaatan nilai modal sosial akan cukup membantu memberikan solusi, sekalipun itu hanya pada lingkup lokal saja. Namun setidaknya peran pemerintah daerah secara tidak langsung dipraktekkan didalam nilai-nilai bersama masyarakat, karena pemerin-

tah juga memiliki sejumlah keterbatasan dan komunitas mampu melakukan itu. Oleh-nya itu, tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas masyarakat terkadang dapat melakukan apa yang gagal dilakukan pemerintah dan pasar karena anggota komunitas, bukan pendatang memiliki informasi penting tentang kebiasaan, kapasitas dan kebutuhan anggota lainnya (Bowles dan Gintis, 2002: F423).

Kapasitas seperti itu tentu positif bagi pengembangan masyarakat. Selain itu, *community governance* juga dapat dipahami sebagai manajemen tingkat masyarakat dan pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh, dengan, atau atas nama masyarakat, oleh kelompok masyarakat/*stakeholder* (Bowles dan Gintis, 2002; Totikidis, Armstrong & Francis, 2005; Sudarmo, 2011). Selain itu, penguatan modal sosial juga berkorelasi dengan efektivitas *governance* (Halsell, 2012).

Sebuah komunitas (*community*) untuk melakukan *governance* dengan efektif maka ia harus memiliki kapasitas untuk belajar, melakukan eksperimen dan beradaptasi secara kreatif terhadap ancaman-ancaman dan peluang-peluang yang ada (Innes & Booher dalam Sudarmo, 2008: 103). Untuk membangun kapasitas yang memadai bagi *governance*, komunitas perlu melakukan interaksi dan berbagi peran secara teratur diantara para pemain yang beraneka ragam dalam memecahkan masalah dan melaku-

kan kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas baru yang sangat kompleks berkenaan dengan pemecahan masalah bersama yang dihadapinya (Burns &Stalker, 1996: Sudarmo, 2008: 103-104).

Jelas bahwa sebuah komunitas yang memiliki kapasitas untuk *governance* maka ia harus mempunyai sejumlah kriteria tersebut. Sudarmo (2008) memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan kriteria komunitas, yaitu ; (1) kemampuan untuk mengorganisasi dirinya secara informal, (2)kemauan belajar dari pengalaman sebelumnya dan hal-hal yang belum diketahui untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang, (3) bekerja dalam waktu yang jelas dan nyata melalui *network*, (4) kesediaan berbagi peran diantara keanekaragaman pelaku/stakeholder sebagai sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia lainnya yang tersedia, dan (5) terselenggaranya distribusi intelegensia untuk memecahkan masalah bersama, dan ini berarti menuntut kesediaan berbagi informasi dan komunikasi terbuka yang menjamin transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas satu sama lain, dan adaptasi terhadap situasi lingkungan yang *uncertain* dan kompleks. Dengan kata lain, komunitas dengan kapasitas seperti ini bisa menjadi substansi untuk terselenggaranya *good governance*, ketika individu, *state* ataupun *market* gagal mewujudkan kapasitasnya sebagai bagian tatanan sosial (Sudarmo, 2008: 101-112).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini kemudian berkenaan dengan pengelolaan modal sosial pada komunitas perempuan pesisir, dimana kondisi tersebut dikelola melalui kelompok yang dikaji sebagai bentuk keterlibatan kaum perempuan dalam dalam *governance*. Dengan mengambil setting pada kelompok perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa Kota Baubau.

Penelitian ini menekankan pada pemerolehan pada masalah proses dan makna, sehingga jenis penelitian yang tepat adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengambilan sampel melalui *purposive sampling* yang dipadu dengan *snowball sampling*. Konsisten dengan jenis penelitian, data dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipasi, *focus group discussion* serta telaah dokumen. Validitas data dilakukan triangulasi data dan sumber, serta melalui analisis interaktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Kelurahan Sulaa merupakan salah satu wilayah pesisir di Kota Baubau, terletak di wilayah Kecamatan Betoambari yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan pesisir pantai, yang mana secara keseluruhan memiliki luas wilayah sebesar 46,55 ha/m².

Pendudukan kelurahan Sulaa pada tahun 2012 tercatat sejumlah 1642 jiwa, yang terdiri dari 803 penduduk laki-laki dan 839 penduduk perempuan. Wilayah kelurahan Sulaa berbatasan dengan Sebelah utara dengan Kelurahan Katobengke, sebelah selatan dengan Desa Lawela, Kabupaten Buton, sebelah timur dengan Kelurahan Waborobo, dan sebelah barat dengan Laut (BPS Kota Baubau, 2013).

3.2. PEMBAHASAN

Persoalan utama dalam memahami sebuah komunitas lokal khususnya kelompok perempuan adalah seperti apa dinamika lokal yang terjadi di komunitas bersangkutan. Mengingat bahwa komunitas masyarakat pesisir bukanlah *state* atau organisasi publik lainnya yang memiliki aturan yang sangat jelas dan formal. Untuk itu, bagaimana sebuah komunitas dipandang dalam *governance* akan dipengaruhi oleh seperti apa karakteristik khusus komunitas masyarakat pesisir.

3.2.1. *Sabangka Sarope* sebagai *Social Capital* Masyarakat Pesisir

Tiap daerah sudah pasti memiliki nilai sosial yang menjadi pedoman hubungan sosialnya. Begitu juga dengan masyarakat pesisir Kota Baubau memiliki yang memiliki serangkaian nilai solidaritas sosial tersendiri dengan masyarakat pesisir lainnya. Nilai-nilai lokal masyarakat pesisir

seperti ini dalam istilah bahasa setempat disebut sebagai nilai *sabangka sarope* (sahabat satu perahu), dimana pada lingkup praktisnya nilai ini menjadi dasar etika pergaulan, interaksi dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh masyarakat.

Melalui nilai lokal tersebut terdapat dua pendekatan didalamnya, yaitu: *Pertama*, ikatan emosional masyarakat pesisir yang mewujud dalam etika pergaulan sehari-hari. Ikatan emosional ini juga yang mendasari pemahaman oleh adanya saling percaya diantara masyarakat, yang kemudian mewujud dalam kerjasama kolektif yang dilakukan masyarakat pesisir. *Kedua*, pada kepemimpinan lokal masyarakat pesisir dimana prinsip *sabangka sarope* jika dikaitkan dengan pemimpin lokal dimasyarakat.

Pengejewantahan nilai-nilai lokal ini menjadikan masyarakat lebih mudah diorganisir dalam artian in-formal. Selain itu, aktivitas dan interaksi masyarakat dalam bentuk organisasi-organisasi lokal dapat ditemukan dalam kelompok-kelompok masyarakat pesisir, termasuk juga adalah kaum perempuan. Dimana kelompok ini dikenali berdasarkan pada jenis pekerjaan masyarakat, selain itu kelompok masyarakat ini menjadi sarana bagi masyarakat pesisir untuk membangun hubungan dengan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, melalui nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah tersebut dapat

dikatakan sebagai bentuk modal sosial masyarakat. Hal ini dijelaskan dengan adanya interaksi yang berlangsung melalui kepercayaan (*trust*), kerjasama (*cooperation*), norma sosial (*social norms*), hubungan timbal balik (*reciprocal*) dan aksi bersama pada masyarakat pesisir (Hasbullah, 2006; dalam Suharto, 2011: 98-100). Hal ini tentu sejalan dengan apa yang menjadi unsur pembangun dalam memahami modal sosial (*social capital*) melalui nilai-nilai *sabangka sarope* oleh masyarakat pesisir.

Dalam pemahaman domestik, nilai lokal seperti ini dalam kelompok masyarakat khususnya kelompok perempuan dikenal dengan sebutan *sakampo* (satu kampung). Istilah ini merujuk sebagai bentuk ikatan kekeluargaan yang hadir di masyarakat oleh karena domisili atau tempat tinggalnya dalam satu kampung. Melalui ikatan seperti ini juga menjadi sarana perempuan pesisir untuk mengorganisir dirinya dalam kelompok, membuat keputusan-keputusan bersama, hingga berbagi informasi. Sekalipun memang arus deras modernisasi menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan ikatan tersebut. Namun sejauh ini, persoalan seperti mampu di tangani melalui kelompok yang dibuat oleh masyarakat.

3.2.2. Kelompok Perempuan Pesisir dan Governance

Melalui nilai lokal *sakampo* (satu kampung sebenarnya adalah sadar atau

tidak sadar masyarakat tengah hidup dalam bentuk komunitasnya berdasarkan dengan lingkup daerah atau kampung mereka, dan hingga saat ini telah diketahui manfaatnya baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Kesemuanya itu bisa disebut sebagai kelompok masyarakat, yang didalam kelompok seperti itulah nilai kebersamaan senantiasa diasah dari hari kehari. Silang-menyalang “keanggotaan” (*cross-cutting affiliation*) dalam kelompok/ komunitas lokal ini, telah menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) ketika komunitas lokal berada dalam situasi krisis (Purwosantoso, 2002).

Bentuk transformasi perempuan pesisir dalam kelompok-kelompoknya menjadi sarana dimana perempuan memiliki kemampuan untuk mengorganisir dirinya sendiri, selain hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Sekalipun kelompok tersebut merupakan dibentuk oleh karena program LSM dan pemerintah daerah, akan tetapi keberlanjutan kelompok-kelompok tersebut kemudian menjadi melalui sarana kelompok perempuan menjalin hubungan dengan berbagai pihak utamanya pemerintah daerah, karena itu proses sosial kelompok-kelompok tersebut mengindikasikan berlangsungnya *governance* di tingkatan kelompok masyarakat pesisir secara umum.

Setidaknya dapat ditemukan di Kelurahan Sulaa, kelompok perempuan pesisir yang dikategorikan pada dua hal; yakni :

- a. Kelompok Penenun Sarung, dimana kelompok ini adalah hanya terbatas pada perempuan yang berprofesi sebagai penenun sarung. Profesi ini adalah sektor dominan setelah nelayan di Kelurahan Sulaa utamanya bagi kaum perempuan. Biasanya kaum perempuan selain sebagai ibu rumah tangga juga mengisi waktu dengan menenun kain sarung. Disisi lain kelompok ini dibentuk sebagai sarana berbagai informasi bagi perempuan yang berprofesi sebagai penenun sarung, maupun sebagai sarana pemasaran bagi produk sarung mereka. biasanya juga pemerintah daerah menggunakan jasa usaha mereka sebagai bagian dari promosi daerah.
- b. Kelompok Perempuan Pesisir yang pekerjaannya lebih homogen. Kelompok jenis ini lebih terbuka dimana profesi perempuan anggotanya berasal dari beragam profesi. Kelompok ini lebih berorientasi sebagai wadah berkumpulnya perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa dengan berbagai latar belakang. Kelompok ini juga menjadi sarana memperoleh informasi bagi perempuan. Disisi lain, kelompok ini berafiliasi dengan salah satu LSM di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Melalui kelompok-kelompok ini dapat disadari adanya indikasi *governance*. Dimana paradigma *governance* yang tidak membatasi bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh institusi pemerintah saja. Namun masyarakat juga bisa melakukan proses-proses tersebut secara minimal untuk konteks lingkungannya dan kepentingan komunitasnya. Dalam hubungan atau interaksi seperti itu, tentu didukung dengan pengelolaan modal sosial masyarakat yang mewujudkan dalam saling percaya, saling kerjasama dan membentuk jaringan kerjasama.

Karenanya, kelompok-kelompok perempuan pesisir tersebut hadir sebagai sarana bagi pengelolaan modal sosial masyarakat pesisir khususnya perempuan. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa modal sosial (*social capital*) lebih mengacu pada apa yang dilakukan kelompok daripada apa yang dimiliki orang-orang secara individu, walaupun kapasitas individu juga penting untuk berkontribusi bagi kelompok atau komunitas (Sudarmo, 2011:189).

3.2.3. Kapasitas *Community Governance* Kelompok Perempuan Pesisir di Kelurahan Sulaa.

Dari pemahaman sebelumnya mengenai realitas perempuan pesisir dalam konsep *governance*, yang kemudian diidentifikasi bahwa keberadaan proses *governance* di komunitas masyarakat pesisir melalui

kelompok-kelompok perempuan tersebut, pada akhirnya menuntun studi ini pada salah satu proses modal sosial (*social capital*) masyarakat pesisir dalam kelompok-kelompok perempuan pesisir tersebut. Maka, aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam kelompok-kelompok tersebut akan di jelaskan melalui konsep *community governance*.

Untuk kepentingan penelitian ini, bahwa dalam memahami proses *governance* oleh kaum perempuan pesisir memerlukan serangkaian kriteria kapasitas yang mengacu pada kriteria batasan-batasan kapasitas kelompoknya dalam proses *governance* secara umum, menurut Sudarmo (2008) yang menjelaskannya sebagai sejumlah kriteria yang harus dimiliki sebuah kelompok yaitu; 1) Proses Informal Sosial, 2) Kemauan Belajar dari Pengalaman, 3) Bekerja melalui *network*, 4) Kesiediaan berbagi peran, dan 5) Terselenggaranya distribusi pengetahuan. Adapun kelompok dan aktivitas organisasional yang dijalankannya adalah sebagai berikut ;

a. *Community governance* Pada Kelompok Perempuan Penenun

Dalam Kelompok penenun dibagi menjadi dua kelompok kecil dengan nama adalah kelompok Lakeba dan Kelompok Kainawa Molagina. Masing-masing kelompok di pimpin oleh ketua kelompok yang dipilih melalui proses musyawarah kelompok.

Secara umum proses organisasi kelompok ini dicirikan dengan proses yang infor-

mal dimana musyawarah bersama menjadi sarana membuat konsensus bersama. Disamping itu, untuk mengantisipasi segala perubahan dikemudian hari dan untuk tetap menjaga kelangsungan usaha mereka melakukan gerakan menabung bagi kelompok, serta senantiasa membangun hubungan relasional melalui arisan kelompok. Selain itu, kelompok ini dijadikan sebagai sarana berbagi informasi dan pengetahuan misalnya melalui kegiatan arisan hingga menenun bersama di dalam bangsal yang sudah disediakan oleh Pemda. Didalam proses inilah kemudian terjadinya pertukaran informasi dan pengetahuan, disamping itu menjadi sarana membentuk kebersamaan dari hari ke hari.

Kerjasama kelompok juga dilakukan dengan berbagai pihak dalam hal pemasaran dan pelatihan-pelatihan untuk inovasi dalam menenun. Tercatat bahwa dari beberapa anggota kelompok telah mengikuti berbagai pelatihan yang dilakukan oleh Pemda dan juga ikut dalam promosi pariwisata Kota Baubau. Dominasi ketua kelompok memang cukup menonjol, namun dalam pembagian peran mewakili kelompok di berbagai pelatihan cukup terbuka bagi setiap anggotanya.

b. *Community governance* Pada kelompok Perempuan Pesisir

Kelompok perempuan pesisir lainnya di Kelurahan Sulaa adalah kelompok perem-

puan dengan jenis pekerjaan yang cukup homogen, kelompok dipimpin oleh ketua kelompok yang dipilih melalui mekanisme musyawarah.

Kemampuan mengelola organisasi sebagian besar dilakukan dengan mekanisme informal, kelompok cukup terbuka dengan berbagai latar profesi hanya saja memang domain kelompok adalah kaum perempuan pesisir. Musyawarah atau pertemuan menjadi sarana memutuskan konsensus bersama yang dilakukan secara reguler setiap satu bulan sekali. Sebagai bentuk komitmen antar anggota, kelompok ini melakukan gerakan menabung bersama yang dilakukan penyeteroran setiap bulannya. Hal ini juga sebagai upaya kelompok menghadapi kondisi akan datang, kemampuan ini dinilai sebagai kapasitas kelompok dalam manajemen keuangan kelompok.

Selain itu, kelompok ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai upaya belajar, bertukar informasi dan mendapat berbagai pelatihan. Kelompok perempuan pesisir ini kemudian memberikan gambaran bahwa perempuan pesisir bukan sekedar sebagai ibu rumah tangga dengan peran-peran domestiknya saja. namun, pe-

ran masyarakat sipil utamanya kelompok perempuan pesisir tersebut mampu menjadi penyeimbang yang urgen agar perempuan lebih terlindungi dari peminggiran perannya dalam struktur sosial.

Dari penjelasan diatas bahwa masing-masing kelompok masyarakat menunjukkan karakteristik aktivitas *governance*-nya sendiri-sendiri. Akan tetapi, setidaknya aktivitas tersebut memberikan informasi bahwa kapasitas kelompok-kelompok perempuan pesisir dan kriteria batasan kapasitas perempuan pesisir dalam *governance* memiliki keterkaitan, sekalipun kemudian terjadi berbagai modifikasi-modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya kelompok masyarakat pesisir.

Secara umum memang dapat dipahami bahwa proses organisasi kelompok akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman nilai lokal, sumberdaya kelompok, dan modal sosial yang kemudian memberikan konsekuensi pada seperti apa instrumen kelompok melakukan interaksi baik didalam maupun diluar kelompok dalam menangani persoalan-persoalannya. Berikut adalah penjelasan mengenai kapasitas *governance* kelompok perempuan pesisir ;

Tabel. 1
Matriks Kapasitas Governance Kelompok Perempuan Pesisir

No.	Kriteria Governance	Kapasitas Kelompok-Kelompok Perempuan Pesisir.
1.	Proses Informal Sosial	Bentuk organisasi informal mengedepankan musyawarah. Kelompok secara mandiri memilih ketua, membuat aturan serta

		menegakkannya, dan membuat keputusan-keputusan.
2.	Kemauan Belajar dari Pengalaman	Gerakan menabung sebagai bentuk ikatan kolektif kelompok, dan juga sebagai sarana kelompok menghadapi kondisi yang akan datang. Disamping itu hal ini sebagai kemampuan manajerial pendapatan anggota kelompok.
3.	Bekerja Melalui <i>Networks</i>	Melakukan kerjasama dengan kelompok lainnya, LSM dan Pemerintah Daerah dalam hal pemasaran, informasi, dan berbagi pengetahuan.
4.	Kesediaan berbagi Peran	Peran Ketua Kelompok Dominan Adanya distribusi peran dalam mewakili kelompok di berbagai pelatihan
5.	Terselenggaranya Distribusi Intelegensia	Kelompok menjadi sarana untuk berbagi informasi dan pengetahuan

Sumber : Diolah dari data primer.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kapasitas kelompok-kelompok perempuan pesisir memiliki kemampuan *governance*-nya sendiri-sendiri. Betapapun demikian, kapasitas *governance* yang dilakukan oleh kelompok perempuan secara umum memiliki karakteristik yang sama. Oleh karena itu, kemampuan tersebut sejalan dengan pengelolaan modal sosial perempuan pesisir untuk mengelola dan mengorganisir kelompoknya masing-masing. Karena itu, rangkaian kapasitas tersebut dapat dikaji sebagai aspek modal sosial kelompok perempuan pesisir.

3.2.4. *Community Governance* melalui modal sosial kelompok perempuan Pesisir.

Secara umum, kapasitas *governance* yang ditunjukkan oleh kelompok perempuan pesisir diatas kemudian menjadi sarana masyarakat untuk mengelola kelompoknya sehingga tetap berkelanjutan (*suistenable*).

Kaum perempuan pesisir dalam lingkup kelompok-kelompok tersebut telah merasakan manfaat yang diterimanya terhadap keterlibatannya melalui kelompok masyarakat pesisir.

Dari setiap aktivitas yang ditunjukkan oleh kelompok perempuan pesisir dalam kajian ini, dapat dipetakan model bekerjanya modal sosial di dalam kelompok. Sebagaimana aspek kolektif, modal sosial menyangkut hubungan, interaksi dan koheisi sosial yang terjalin dalam kelompok perempuan tersebut. Melalui kelompok ini pula kemudian menjadi sarana kaum perempuan untuk bertukar pengetahuan, mengelola organisasi hingga membangun jaringan pemasaran hasil usaha mereka.

Hubungan tersebut dapat digambarkan pada argumentasi berikut :

a. *Modal sosial Bonding*

Modal sosial *bonding* berarti interaksi yang terjadi dalam kelompok, dimana hal

ini terjadi oleh karena adanya saling percaya dalam pengelolaan kelompoknya masing-masing.

Secara umum menyangkut interaksi di dalam internal kelompok perempuan pesisir. Melalui interaksi dalam ranah ini kelompok perempuan membangun sikap saling percaya dan juga menyangkut kepemimpinan kelompok. Sekalipun kemudian kelompok yang terbentuk adalah informal, setidaknya kelompok perempuan tersebut memiliki andil yang cukup positif dalam membantu keberdayaan masyarakat khususnya perempuan, oleh karena itu pihak pemerintah daerah seringkali bekerjasama dengan kelompok tersebut.

Secara teoritik dalam interaksi yang pada tataran *bonding* di kelompok perempuan pesisir dapat digambarkan pada kepemimpinan organisasi yang efektif, kemampuan mengelola organisasi, adanya kesadaran gerakan menabung, dan berlangsungnya proses berbagi informasi dan berbagi pengetahuan dalam kelompoknya.

b. Modal Sosial *Bridging*

Bridging berarti menjembatani, pada konteks modal sosial hal ini terlihat atau dikaji dalam hubungan yang lebih luas lagi dari *bonding*. Dimana *bridging* berarti kelompok masyarakat kemudian mampu membangun hubungan kerjasama positif dengan kelompok lainnya. namun catatan penting dari proses ini adalah hubungan

interaksi sosial hanya terjadi oleh kelompok masyarakat saja.

Jika kemudian merujuk pada apa yang terjadi dalam kasus perempuan pesisir. Ranah *bridging* berarti interaksi kelompok dengan kelompok lainnya dengan berbagai latar belakang, salah satunya adalah hubungan dalam hal pemasaran hasil usaha yang bermotif kultur jaringan. Disisi lain, hal ini menyangkut interaksi dengan kelompok masyarakat lainnya yang mewujud dalam jaringan kerjasama dengan kelompok usaha (bisnis) lainnya, dengan jaringan ini kemudian kelompok masyarakat pesisir memproduksi berbagai inovasi usaha dan berbagai pengetahuan umum lainnya.

c. Modal Sosial *Linking*

Hubungan kelompok pada ranah ini lebih pada hubungan fungsional, atau bisa dikatakan hubungan dengan kelompok/institusi di atasnya. Kelompok perempuan pesisir tentu tidak lepas dari hubungannya dengan pemerintah daerah, oleh karena hubungan usaha dan pelatihan UMKM yang sudah terjalin sebelumnya. Hanya saja, pada konteks ini lebih pada bagaimana hubungan itu terus terjadi dan memberikan *impact* yang positif bagi individu dalam kelompok perempuan maupun kelompok perempuan pesisir itu sendiri.

Pada konteks ini, tataran lingking modal sosial kelompok perempuan pesisir menyangkut interaksi dengan pemerintah daerah dalam bentuk saling percaya, mel-

lui respon terhadap program pemerintah melalui partisipasi kelompok masyarakat pesisir dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat pesisir, serta membantu pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan bagi kelompok masyarakat pesisir lainnya. Konteks hubungan ini sebut saja misalnya pada tahun 2010 hingga 2012 kelompok perempuan tersebut setidaknya telah mengikuti pelatihan, promosi usaha dalam Baubau Expo, pengelolaan bantuan bagi penenun sarung, dan beberapa program lainnya.

Kondisi ini tentu akan mendukung Saling percaya antara pemerintah dan

kelompok perempuan pesisir. Hal ini menjadi wajar, ketika pada tahun-tahun sebelumnya bantuan biasanya tidak diikuti keberdayaan masyarakat atau bahkan bantuan yang salah sasaran. Sedangkan hasil observasi terhadap kelompok perempuan pesisir menunjukkan bahwa penyaluran program melalui kelompok dinilai cukup efektif perihal ketepatan penyalurannya, akan tetapi masih memiliki serangkaian kekurangan utamanya dalam pengawasan dan bagi masyarakat yang diluar kelompok atau bahkan tidak memiliki kelompok.

Tabel 2
Matriks Modal Sosial Terhadap Kapasitas
Kelompok Perempuan Pesisir Kelurahan Sulaa, Kota Baubau

No.	<i>Network Social Capital</i>	Keterangan
1.	<i>Bonding Social Capital</i>	Kepemimpinan organisasi kelompok perempuan yang cukup efektif dalam mengelola organisasi, adanya kesadaran gerakan menabung, dan berlangsungnya proses berbagi informasi dan pengetahuan
2.	<i>Bridging Social Capital</i>	Ditunjukkan dalam bentuk jaringan kerjasama dengan kelompok lain, dengan jaringan ini kemudian kelompok perempuan pesisir memproduksi berbagai inovasi usaha dan berbagai pengetahuan umum lainnya
3.	<i>Linking Social Capital</i>	Ditunjukkan pada asanya partisipasi kelompok perempuan pesisir baik dalam pengembangan kelompok, pelatihan, pemasaran produk usaha mereka, serta pemerolehan bantuan dari Pemda.

Sumber : diolah dari data primer

Kajian ini memahami bahwa *social capital* dan penguatan kapasitas *governance* kelompok perempuan pesisir dapat diamati dalam kelompok perempuan di Kelurahan Sulaa. Modal sosial tersebut menyangkut pengelolaan kepercayaan (*trust*), kerjasama (*cooperation*), hubungan timbal balik (*recip-*

rocal), jaringan sosial (*social networking*), serta aturan-aturan (*norms*) kolektif didalam kelompok perempuan yang berlangsung dalam modal sosial *bonding*, *bridging* dan *linking* perempuan pesisir. Kemampuan ini kemudian mewujudkan pada kapasitas kelompok perempuan dalam kapasitasnya

melakukan *governance* di tingkat lokal. Dalam pengertian disini, indikasi *governance* diamati dalam kerangka organisasi informal perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa.

Rangkaian aktivitas tersebut kemudian dipercaya mampu menjadi sarana mengatur dan mengelola kelompoknya utamanya bagi kaum perempuan pesisir. Kondisi ini tentu berkaitan dengan pengelolaan modal sosial masyarakat pesisir di kelurahan sulaa secara umum. Berdasarkan pada data yang diperoleh melalui penelitian, kelompok perempuan pesisir ini mampu memberi peran kontributif sekalipun secara minimal kepada kaum perempuan dalam kelompoknya maupun umum lainnya. kondisi ini seperti misalnya memberikan solusi bagi ekonomi keluarga, penyampain perilaku hidup bersih, berbagai pengetahuan dan informasi, mengelola organisasi, mengadvokasi masalah KDRT, hingga membangun relasi yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah misalnya saja pada akses permodalan (modal mikro), yang didasarkan pada adanya kelompok masyarakat.

Aktivitas seperti ini dapat dipandang sebagai bagian *good governance*, sebab mereka melalui pengelolaan modal sosial bisa mengatasi masalah-masalah tertentu, termasuk masalah konflik yang tidak bisa diatasi oleh individu yang bertindak sendiri atau oleh pasar (*market*) bahkan oleh pemerintah (*state*) sekalipun (Sudarmo, 2011: 191).

Betapapun demikian, kelompok perempuan pesisir dengan segala aktivitasnya hari ini memiliki latar belakang kepentingan yang sama dalam usaha mereka masing-masing. Keterkaitan ini akan ber-hubungan dengan kepentingan dan tuntutan ekonomi para anggotanya. Ditambah lagi kemudian dengan peran-peran domestik perempuan lainnya, tidak menutup kemungkinan eksistensi kelompok perempuan dipertaruhkan.

Pada posisi ini kapasitas organisasional sebagai bentuk kemampuan *governance* masyarakat khususnya kelompok perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa, dihadapkan dengan tuntutan ekonomi keluarga dikemudian hari.

Karena itu kapasitas seperti ini mesti didukung oleh pengelolaan modal sosial masyarakat secara umum secara berkelanjutan. Modal sosial akan semakin menguat jika selalu digunakan (Suharto, 2006). Dalam kaitan ini dapat dijelaskan yakni; Kepercayaan (*trust*) menjadi modal sosial untuk tetap eksisnya kelompok masyarakat tersebut ditengah-tengah kelompok masyarakat pesisir lainnya yang akhirnya bubar. Sedangkan, adanya perbedaan kapasitas itu mengarah pada kemampuan kelompok perempuan membangun jaringan (*network*) baik itu dalam kelompok (*intern*) oleh peran ketua yang dominan dan jaringan di luar kelompok (*ekstern*) dengan kelompok lainnya yang berbeda latar belakang. Selain itu, dapat dipahami bahwa kemampuan *gover-*

nance oleh kelompok-kelompok masyarakat pesisir disini erat kaitannya dengan relasi antar aktor kelompok baik itu dalam maupun diluar kelompok masyarakat.

Disisi lain, penguatan modal sosial dapat dilakukan melalui intervensi pemerintah daerah. Dimana dengan mengacu pada makna *governance* sebagai bentuk jaringan kerjasama antara pemerintah (*state*), swasta (*non-state*) dan masyarakat (*society*), untuk itu keterlibatan berbagai aktor ini adalah sebuah keniscayaan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok masyarakat pesisir juga memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak bisa disediakan atau ditangani sendiri oleh kelompok masyarakat. Sehingga pemerintah daerah Kota Baubau diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, dengan memanfaatkan modal sosial pada kelompok perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa.

Untuk memahami hubungan kelompok perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Baubau, perlu memperhatikan dua kriteria tambahan yaitu aksesibilitas dan efektivitas.

Kriteria aksesibilitas menyangkut pemberian dukungan untuk adanya hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara kelompok masyarakat dan pemerintah daerah Kota Baubau, utamanya adalah dalam mengatasi permasalahan publik, implementasi kebijakan atau bahkan pada formulasi kebijakan yang hingga saat ini masih terjalin melalui

program yang diperoleh oleh kelompok masyarakat. hal ini cukup beralasan karena pada dasarnya yang lebih memahami kondisi lokal masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, dengan adanya hubungan timbal balik tersebut kemudian membawa pada terwujudnya kriteria efektivitas yakni menyangkut hasil guna program pemerintah daerah secara umum.

Tentunya kondisi ini berkenaan dengan adanya *interest affected* yakni sejauh mana kepentingan masyarakat terakomodasi oleh suatu kebijakan dan dapat memberi ruang gerak, partisipasi dan berbagi kekuasaan dengan masyarakat pesisir khususnya disini adalah kelompok perempuan pesisir. Pada gilirannya saling silang kepentingan ini dapat dipahami sebagai hubungan antara *shahreholder* daerah yang bersifat hubungan yang saling melengkapi (*complement*) dan mendukung satu sama lain.

Sejalan dengan hubungan ini, Sudarmo (2011: 193) menjelaskan bahwa melalui *networks* dan *local governance, local development* akan terbagun sejalan dengan budaya lokal dan dengan demikian akan menjadi lebih *legitimate* ketika semua pihak/stakeholder memberikan dukungannya. Dengan memperkuat dan mendukung *social capital* beserta variasinya seperti sikap *local collaboration* tradisional yang bisa dimanifestasikan dengan aktivitas kelompok masyarakat pesisir dalam hal solidaritas sosial atau perilaku gotong royong, sikap *volun-*

teer (sukarela) dalam menyediakan barang publik, dalam masyarakat yang sudah ada sejak dahulu, serta memperkuat posisi masyarakat yang lemah atau yang ada dalam kungkungan dominasi *state* yang begitu *powerful*, atau memperbaiki kelemahan *state* dalam menyediakan pelayanan publik.

Oleh karena itu, keterkaitan antara kapasitas *governance* dan pengelolaan modal sosial kelompok perempuan pesisir, dapat menjadi gambaran sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di tingkat masyarakat lokal. Pada posisi ini, dapat dipahami bahwa peran perempuan pesisir juga dapat dilihat sebagai entitas yang mampu menjadi salah satu partner pemerintah dalam menjalankan layanan publik khususnya bagi kaum perempuan pesisir di Kelurahan Sulaa.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial masyarakat pesisir menjadi aspek substansial dalam interaksi sosial antar individu-individu dalam komunitasnya maupun peran kepemimpinan didalamnya. Begitu juga yang ditunjukkan oleh perempuan pesisir yang dalam kajian ini menemukannya dalam kelompok-kelompok perempuan pesisir yakni kelompok penenun dan kelompok perempuan *poose'ose*. Olehnya itu, pengelolaan modal sosial didalam proses organisasional perempuan pesisir mengindikasikan adanya kapasitas perempuan pe-

sisir dalam wacana *governance*, yang mana paradigma ini mendukung pernyataan bahwa kelompok masyarakat juga mampu melakukan proses-proses pemerintahan atau sejenisnya yang belum mampu atau menjadi keterbatasan pemerintah di tingkatan lokal masyarakat.

Oleh karena itu, Aspek modal sosial dalam hal bonding, bridging dan linking social capital adalah indikator yang dapat diamati dalam kapasitas Community Governance kelompok perempuan pesisir. Dalam operasionalisasinya kapasitas tersebut teramati dalam kegiatan arisan, gerakan menabung, advokasi perempuan dan anak-anak, hingga partisipasi kelompok perempuan pesisir baik dalam pengembangan kelompok, pelatihan, pemasaran produk usaha mereka, serta sebagai sarana pemerolehan bantuan dari Pemda.

Betapapun demikian, perubahan lingkungan, kemampuan sumberdaya serta tuntutan yang terus berubah memerlukan adanya adaptasi terus menerus terhadap kapasitas kelompok perempuan pesisir. Oleh karena itu sejumlah kelemahan masih ditemui dalam kapasitas *governance* perempuan pesisir; misalnya saja ketika diperhadapkan oleh tuntutan ekonomi, perubahan lingkungan, serta pengembangan pengetahuan anggotanya. Untuk itu, kapasitas ini juga membutuhkan dukungan dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah untuk kemudian mendudukan kapasitas kelompok perempuan

an pesisir tersebut sebagai dari pemberdayaan masyarakat di Kota Baubau.

Daftar Pustaka

Buku

Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln, (2009)., *Hanbook Of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.s

Dwiyanto, Agus (ed). (2008). *Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: UGM Press

Field, John. 2010., *Modal Sosial*, Bandung: Kreasi Wacana.

Halsall, J. P. (2012). Community Governance Where did it go Wrong. *JOAAG*, Vol. 7. No. 2

Hamid, Abdul Rahman. (2011). *Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Sudarmo, (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*, Surakarta: Smart Media.

Suharto, Edi. (2010) cet-5., *Analisis Kebijakan Publik: Dilengkapi Contoh-Contoh Naskah Kebijakan (Policy Paper)*, Bandung: Alfabeta.

------. (2011) cet-3., *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Stocker, Gerry. (1998). *Governance as Theory : Five Proposition*. UNESCO : Blackwall Publisher

Jurnal Offline

Kooiman, Jan. et.al. (2008). Interactive Governance and Governability an Introduction, *The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*, ISSN 1602-2297. <http://www.journal-tes.dk/>

Purwosantoso, (2003). Pengembangan Modal Sosial dalam Rangka Pengembangan Otonomi Desa: Suatu Tantangan. *Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan Volume 3, Halaman 46-64*.

Raharja, Sam'un Jaja. (2009). Paradigma Governance dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik pada Pengelolaan Sungai. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei-Agustus 2009, Volume 16, Nomor 2, hlm. 82-86.

Sudarmo, (2009), "Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan-hambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance", *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 5 no. 2 (Nov). page 117-132.

Sudarmo. (2008). Social Capital untuk Community Governance, *Jurnal Spirit*

Publik, Volume 4, Nomor 2 Halaman 101-112.

Jurnal Online

- Ansell, Chris dan Alison Gash, (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research (JPAR) 18: 543-571.* diakses melalui <http://scholar.google.co.id> (20/04/2014. Pukul 15.00 wib).pdf
- Blaug, Ricardo, Louise Horner, Amy Kenyon & Rohit Lekhi, (2008). *Public value and local communities: A literature review*, The Work Foundation. Diakses melalui : <http://citeseerx.ist.psu.edu> (14/10/2013. Pukul 14.00 wib).pdf
- Bowles, Samuel and Herbert Gintis, Social Capital and Community Governance. (2002). *The Economic Journal 112 (November), F419-F436. Royal Economic Society.* Diakses melalui <http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/SocialCapital.pdf>. (10/10/2013. pukul 22.00 wib) .pdf
- Coleman, JS. (1988). Social Capital In The Creation of Human Capital, *The American Journal of Sociology 94: S95-S210.* (14/10/2013. Pukul 14.00 wib)
- Eversole, Robyn. (2011)., *Community Agency and Community Engagement: Re-theorising Participation in Governance*, *Journal of Public Policy / Volume 31 pp 51-71*, http://journals.cambridge.org/abstract_S0143814X10000206 (10/10/2013. pukul 22.00 wib) .pdf
- Lin, Nan. (1999). Building a Network Theory of Social Capital, *Connections volume 22(1) :28-51.* diakses melalui : <http://www.insna.org/Connections-Web/Volume22-1/V22%281%29-28-51.pdf>. (diakses, 10/10/2013. Pukul 22.00 wib) .pdf
- Totikidis V, Armstrong A F & Francis R D. (2005). The Concept of Community Governance: A Preliminary Review, disampaikan dalam *Refereed paper presented at the GovNet Conference, Monash University, Melbourne, 28-30th November 2005.* Diakses melalui <http://vuir.vu.edu.au>. (diakses, 10/10/2013. pukul 22.00 wib) .pdf
- van Oorschot, Wim and Ellen Finsveen. 2010. Does the welfare state reduce inequalities in people's social capital?, dalam *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 30 Nos. 3/4, pp. 182-193. Diakses melalui : www.emeraldinsight.com/0144-333X.htm (diakses, 14/10/2013. 14.00 wib) .pdf